



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT**

**RAPAT KOMISI IX DPR RI**

**(Kementerian Kesehatan RI, Kementerian Ketenagakerjaan RI, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS Kesehatan) dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJS Ketenagakerjaan))**

---

Tahun Sidang	: 2020-2021
Masa Persidangan	: V
Rapat ke	: 4 (empat)
Jenis Rapat	: Rapat Kerja, Rapat Dengar Pendapat dan Rapat Dengar Pendapat Umum dilaksanakan secara tatap muka dan virtual
Dengan	: 1. Menteri Kesehatan RI; 2. Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM); 3. Direktur Utama PT. Bio Farma; 4. Ketua Umum Komisi Nasional Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi (Komnas KIPI).
Sifat Rapat	: Terbuka
Hari/tanggal	: Kamis, 20 Mei 2021
Pukul	: 13.00 WIB – selesai
Acara	: 1. Perkembangan Pelaksanaan Vaksinasi Covid-19 termasuk strategi Pemerintah untuk ketersediaan vaksin Covid-19; 2. Keamanan dan Efektifitas vaksin Covid-19 yang digunakan dalam program vaksinasi; 3. Penanganan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi (KIPI).
Ketua Rapat	: Felly Estelita Runtuwene, SE. / Ketua Komisi IX DPR RI
Sekretaris Rapat	: Suryatna, S.IP./ Kepala Bagian Sekretariat Komisi IX DPR RI
Tempat	: Ruang Rapat Komisi IX DPR RI Gedung Nusantara I Lt.1 Jl. Jenderal Gatot Subroto, Jakarta Pusat

- Peserta Rapat Hadir dan Virtual :
- A. Fisik 18 orang Virtual 19 orang dari 50 orang Anggota Komisi IX DPR RI;
  - B. Menteri Kesehatan RI diwakili Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan: dr. Slamet, beserta jajaran;
  - C. Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) diwakili Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik: Reri Indriani, beserta jajaran;
  - D. Direktur Utama PT. Bio Farma: Honesti Basyir;
  - E. Ketua Umum Komisi Nasional Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi (Komnas KIPI): Prof. Dr. Hindra Irawan Satari.

## I. PENDAHULUAN

Rapat Kerja, Rapat Dengar Pendapat dan Rapat Dengar Pendapat Umum Komisi IX DPR RI dengan Menteri Kesehatan RI, Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), Direktur Utama PT Bio Farma dan Ketua Umum Komisi Nasional Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi (Komnas KIPI), Sehubungan dengan tidak hadirnya Menteri Kesehatan RI yang diwakili Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan dan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) yang diwakili Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik, dengan demikian maka semula Rapat Kerja, Rapat Rapat Dengar Pendapat dan Rapat Dengar Pendapat Umum berubah menjadi Rapat Dengar Pendapat dan Rapat Dengar Pendapat Umum dengan Direktur Utama PT Bio Farma dan Ketua Umum Komisi Nasional Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi (Komnas KIPI), dibuka pukul 13.15 WIB., dilaksanakan secara tatap muka dan virtual, sesuai dengan Ketentuan Pasal 281 ayat (1) Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib, rapat telah memenuhi kuorum dan dinyatakan terbuka untuk umum.

## II. KESIMPULAN

1. Komisi IX DPR RI menyesalkan ketidakhadiran Menteri Kesehatan RI dan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (Badan POM) dalam Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat pada hari ini tanggal 20 Mei 2021 karena alasan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Untuk itu Komisi IX DPR RI akan mengirimkan surat keberatan kepada Presiden RI terkait hal ini.
2. Komisi IX DPR RI mendesak PT Bio Farma (Persero) untuk :
  - a. Menjaga ketersediaan vaksin Covid-19 Bio Farma dengan memastikan produksi dan distribusi berjalan sesuai jadwal; dan
  - b. Memastikan kualitas dan alur distribusi vaksinasi gotong royong tidak hanya di kota besar namun sampai ke daerah demi pemerataan akses masyarakat.

3. Komisi IX DPR RI mendukung Komite Nasional KIPI untuk :
  - a. Melakukan monitoring kepada masyarakat setelah vaksinasi Covid-19 serta melakukan Edukasi dan Sosialisasi terkait Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi (KIPI) dengan mengintegrasikan data dalam Program Satu Data Vaksinasi Covid-19 ; dan
  - b. Merevisi Standar Operasional Prosedur (SOP) atas program vaksinasi agar ada jaminan penerima vaksin mendapatkan informasi terkait vaksin yang diterima sehingga masyarakat merasa aman dan terlindungi.

### **III. PENUTUP**

Rapat ditutup pukul 17.25 WIB.